

REALITA, PROBLEMATIKA DAN HARAPAN DALAM SUPERVISI PENDIDIKAN

NURMAYULI

e-mail: nurmayuli1234@gmail.com

Abstrak

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan lembaga pendidikan pemerintah memberikan pengawasan dan pembinaan yang disebut supervisi. Supervisi merupakan Usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas-petugas lain nya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru serta merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran dan metode serta evaluasi pengajaran. Ruang lingkup supervisi pendidikan memiliki dua aspek yaitu; aspek manusia dan aspek aktivitasnya. aspek manusia membahas sikap terhadap tugas, disiplin kerja, moral kerja, kejujuran, ketaatan terhadap peraturan organisasi, kerajinan, kecakapan, kemampuan serta kecerdasannya yang terlibat didalamnya seluruh yang menjadi stekholder dalam lembaga pendidikan. Sedangkan aspek aktivitas/kegiatannya menurut Suwoto ialah meliputi cara kerja (cara mengajar), metoda pendekatan terhadap siswa, efisiensi kerja, dan hasil kerja. 3 unsur oprasional yang harus diperhatikan dalam aspek ini ialah; 1) teknik edukatif, 2)teknik administrasi dan 3) koordinasi dan kerjasama. Namun dalam setiap aspek ruanglingkup tersebut memiliki realita, problem serta harapan yang ingin diwujudkan untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan.

Kata kunci : *Realita, Problematika, Harapan, Supervisi Pendidikan*

PENDAHULUAN

Salah satu komponen yang menunjang berlangsungnya proses pendidikan di lembaga pendidikan disekolah adalah pengawas sekolah. Pengawasan sekolah itu penting karena merupakan mata rantai terakhir dan kunci dari proses manajemen. Hal penting dari proses manajemen sekolah yaitu nilai fungsi pengawasan sekolah terletak terutama pada hubungannya terhadap perencanaan dan kegiatan-kegiatan yang didelegasikan. Dalam proses pendidikan,

pengawasan atau supervisi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan prestasi belajar dan mutu sekolah.

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.0141/Tahun 1969, tertanggal 25 November 1969 diadakan reorganisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1970. Surat Keputusan Menteri Pendidikan tersebut telah melakukan perubahan terhadap sebutan inspeksi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan yang dirubah menjadi pembinaan. Perubahan-perubahan tersebut dimaksudkan, agar usaha-usaha yang dilakukan oleh para supervisor dalam usaha bimbingan dan menuntun para guru, berkenaan dengan proses belajar mengajar di depan kelas atau di sekolah, dapat terlaksana dengan baik, sesuai ketentuan yang telah diatur.

Sahertian (2000:17) Supervisi dalam *Dictionary of Education* Good Carter pada tahun 1959 adalah: Usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas-petugas lain nya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru serta merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran dan metode serta evaluasi pengajaran.

Pentingnya supervisi dewasa ini didasari atas kecenderungan perlakuan yang kurang sehat terhadap guru sebagai manusia atau bentuk penyalah gunaan sumber manusia, atau lebih tepatnya pengurusan sumberdaya manusia. Artinya guru terlalu diperlakukan sebagai objek bukan subjek dalam dunia pendidikan. Tinggi rendahnya mutu pendidikanpun selalu yang menjadi orang yang

paling disorot juga guru. padahal dalam kenyataannya seperti misalnya tuntutan guru dalam mengajar harus sesuai dengan target kurikulum dan membuat tuntutan lainnya yaitu seperti membuat satuan pelajaran, membuat lembar kerja siswa, melaksanakan bermacam-macam tes dan mencatatnya, menjadi wali kelas dan tugas lainnya dengan waktu yang sangat terbatas.

Anehnya, apabila ada kelemahan dan kegagalan dalam kegiatan pembelajaran dalam menerapkan kurikulumnya maka gurulah yang dianggap lemah, padahal guru tak ikut menyusun kurikulum dan peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah. Guru tidak punya jalan untuk menyampaikan kelemahan dalam pembelajaran dalam menerapkan kurikulum. Kepala seolahlah yang dapat menampung seluruh keluh kesah guru sebagai jalan penyambung lidah guru dalam menyampaikan kelemahannya pada pemerintah. Namun kepala sekolah tenggelam dengan organisasi sekolah dengan masalah administrasi sekolah dan sarana dan prasarana saja, sehingga guru kehilangan tempat pengaduan.

Supervisi merupakan pembinaan para guru dilaksanakan para supervisor secara kontinyu, diharapkan dapat menimbulkan semangat dan gairah bekerja para guru dalam menjalankan tugasnya. Di samping itu dapat menimbulkan rasa tanggung jawab atas tugas yang dilaksanakan. Supervisi yang dilakukan oleh supervisor selalu mengenai masalah pelaksanaan aturan- aturan dan ketentuan serta undang-undang yang telah ditetapkan. Kebiasaan yang dilakukan oleh sebahagian supervisor dalam melaksanakan supervisi ke lembaga-lembaga pendidikan lebih banyak bersifat mencari

kekurangan dan kesalahan yang dilakukan para pelaksana atau petugas dalam menjalankan tugas yang telah dirancang sebelumnya.

Akan tetapi jika pembinaan terhadap para guru tidak dilakukan dan dilaksanakan secara baik, kemungkinan dapat mengurangi gairah kerja dan menimbulkan frustrasi dikalangan para guru serta acuh terhadap tugas-tugasnya sebagai seorang pendidik. Akibat dari pembinaan yang kurang maksimal, maka tujuan pendidikan dan pengajaran tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka pembinaan yang dilakukan mengalami kegagalan. Melihat pada permasalahan tersebut di atas, maka supervisor pendidikan dituntut untuk mengevaluasi penyebab kegagalan dalam pembinaan dan diharapkan pembinaan kepada para guru ke depan akan lebih baik, sehingga tujuan pendidikan dan pengajaran dapat dicapai dengan sempurna dan maksimal, efektif dan efisien.

Dalam supervisi adakalanya tidak memiliki dampak positif, artinya kegagalan dalam supervisi yang mengakibatkan supervisi tersebut tidak memiliki nilai tambah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Hal tersebut disebabkan karena adanya problem-problem dalam supervisi yang harus dipahami oleh setiap stekholder pendidikan di lembaga pendidikan. Dari uraian diatas maka penulis ingin membahaskan bagaimana realita dan problem yang terjadi dalam supervisi pendidikan serta memiliki jalan keluar atau solusi pada setiap masalah yang sedang dihadapi.

Pengertian Supervisi Pendidikan

Secara etimologis, istilah supervisi diambil dari perkataan bahasa inggris *Supervision* artinya pengawasan di bidang pendidikan.

Sedangkan orang yang melakukan supervisi disebut dengan supervisor. Dan ditinjau dari morfologinya, supervisi dapat dijelaskan menurut bentuk kata. Supervisi terdiri dari dua kata super berarti atas, dan visi berarti lihat, menilik. Supervisi sendiri merupakan kegiatan pengawasan tetapi sifatnya manusiawi. Kegiatan supervisi dilakukan bukan untuk mencari-cari kesalahan tetapi lebih banyak mengandung unsur pembinaan, agar kondisi pekerjaan yang sedang disupervisi dapat diketahui kekurangannya bukan semata-mata kesalahannya untuk dapat diberitahu apa yang perlu di perbaiki. Dengan pengertian itulah, maka supervisi diartikan sebagai kegiatan berupa pengawasan dan pembinaan dengan tujuan perbaikan pendidikan.

Supervisi merupakan sebuah kegiatan pembinaan sebagaimana yang diuraikan oleh para ahli berikut;

1. Jamil Suprihatiningrum (2013:289), supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif.
2. Suryo Subroto (2010:175), supervisi ialah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar-mengajar yang lebih baik.
3. Suharsini Arikunto (2004:10), supervisi pendidikan adalah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah, agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi mengajar dengan baik.

4. Made Pidarta (1992:33), Pengertian supervisi Pendidikan, adalah suatu proses pembimbingan dari pihak atasan kepada para guru atau personalia sekolah lainnya, yang berlangsung menangani belajar para siswa, untuk memperbaiki situasi belajar mengajar, agar para siswa dapat belajar secara efektif dengan prestasi belajar yang semakin meningkat.

Maka, hakikat supervisi pendidikan adalah suatu proses bimbingan dari pihak kepala sekolah kepada guru-guru dan personalia sekolah yang langsung menangani belajar secara efektif dengan prestasi belajar yang semakin meningkat. Di samping itu juga memperbaiki situasi bekerja dan belajar secara efektif, disiplin, bertanggung jawab, dan memenuhi akuntabilitas.

Selanjutnya supervisi diartikan seluruh usaha yang dilakukan oleh supervisor atau pengawas. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Soetjipto dan Rafli Kasasi (2011: 233), Supervisi adalah semua usaha yang dilakukan supervisor untuk memberikan bantuan kepada guru dalam memperbaiki pengajaran. Senada dengan pernyataan Daryanto (2011:169), supervisi adalah usaha pimpinan dan guru-guru untuk mengetahui situasi lingkungan sekolah dalam segala kegiatannya.

Dengan demikian, Supervisi pendidikan adalah segala bantuan dari supervisor atau semua pemimpin kepala sekolah untuk memperbaiki manajemen pengelolaan sekolah dan meningkatkan kinerja staf/guru dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai dengan optimal. Caranya, dengan cara memberi bantuan, dorongan, pembinaan, bimbingan, dan

memberikan kesempatan bagi pengelola sekolah dan para guru untuk memperbaiki dan mengembangkan kinerja dan profesionalismenya. Misalnya, memberi bimbingan kepada kepala sekolah dan guru melakukan inovasi dalam persoalan administrasi sekolah, tata kelola sekolah yang baik, program pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat atau media pembelajaran dan metode-metode pembelajaran yang lebih baik, cara-cara penilaian yang sistematis terhadap seluruh fase-fase proses pembelajaran.

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa umumnya supervisi pendidikan ditujukan kepada penciptaan atau pengembangan situasi belajar mengajar yang lebih baik. mustofa Syaiful (2013:28) Untuk itu, ada 2 hal yang perlu diperhatikan yaitu: pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan hal-hal yang menunjang kegiatan belajar-mengajar.

Terkait dengan hal itu, aspek utama adalah guru. Jika demikian layanan dan aktifitas persupervisian harus lebih diarahkan kepada upaya memperbaiki dan meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar.

Sejarah Singkat Supervisi Pendidikan

Pada awal mulanya kegiatan untuk memperbaiki mutu pendidikan di sebut inpeksi. Seiring perkembangan jaman istilah impeksi berubah menjadi istilah supervisi. Arikunto (1988:152) Istilahsupervisi muncul diperkirakan pada awal tahun 60-an atau pada dua dasawasa terakhir ini. Munah (2017:1) mengungkapkan bahwa, antara konsep inpeksi dan konsep supervisi sangat jauh

berbeda, dimana konsep inpeksi bersifat pengawasan saja sedangkan konsep supervisi bersifat pengawasan dan pembinaan.

Diperkenalkannya istilah supervisi pertamakali pada di beberapa perguruan tinggi IKIP di Indonesia dengan adanya mata kuliah administrasi pendidikan, yang kemudian dijadikannya sebagai mata pelajaran dan bahan ujian pada SGA/SPG pada tahun ajaran 1965-1966, jadi tidaklah mengherankan jika masih ada dari kalangan pendidik sendiri masih ada yang asing dengan istilah suervisi, terutama bagi mereka yang menamatkan pendidikan guru, baik di tingkat menengah keguruan ataupun pendidikan tinggi sebelum tahun 70-an.

Pada masa kemunculannya di Negara-negara lain menurut Soetopo, di Amerika Serikat aktivitas supervisi baru muncul pada permulaan zaman kolonial, yaitu pada sekitar tahun 1654. Dengan pernyataan bahwa pemuka-pemuka kota bertanggung jawab atas seleksi dan pengaturan kerja guru-guru, gerakan dapat dianggap sebagai cikal bakal lahirnya konsep yang paling dasar untuk perkembangan supervisi moderen. Soetopo (1984:63) menyatakan, di Boston supervisi muncul pada tahun 1709, sebuah komite yang tergabung dalam "*a comite of laymen*" mengunjungi sekolah-sekolah untuk mengetahui penggunaan metode pengajar oleh guru-guru, kecakapan siswa, dan merumuskan usaha-usaha memajukan pengajaran dan organisasi-organisasi sekolah yang baik.

Sedangkan di dunia pendidikan Indonesia sendiri, konsep supervisi diterapkannya secara formal diperkirakan sejak diberlakukannya Keputusan Menteri P dan K, RI. Nomor: 0134/1977,

yang menyebutkan siapa saja yang berhak disebut supervisor di sekolah, yaitu kepala sekolah, penilik sekolah untuk tingkat kecamatan, dan para pengawas di tingkat kabupaten/ Kotamadya serta staf kantor bidang yang ada di setiap propinsi. Sebagaimana yang dinyatakan Sudjana,dkk (2006), bahwa pengawas sekolah berfungsi sebagai supervisor baik supervisor akademik maupun supervisor manajerial. Sebagai supervisor akademik, pengawas sekolah berkewajiban untuk membantu kemampuan profesional guru agar guru dapat meningkatkan mutu proses pembelajaran. Sedangkan sebagai supervisor manajerial, pengawas berkewajiban membantu kepala sekolah agar mencapai sekolah yang efektif.

Tujuan dan Fungsi Supervisi Pendidikan

Tujuan supervisi ialah untuk memberikan perbaikan pada kegiatan belajar mengajar dan hal-hal yang mempengaruhi pembelajaran. Tujuan umum supervisi pendidikan menurut Ary H Gunawan (2011:198) menyatakan, tujuannya harus sama dengan tujuan pendidikan nasional sesuai keputusan MPR yang tertera dalam GBHN melalui perbaikan serta peningkatan kegiatan belajar mengajar.

Olive dalam Sahertian (2008:19), mengemukakan tujuan supervisi pendidikan yaitu: 1) mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan disekolah, 2) meningkatkan proses belajar-mengajar disekolah dan 3) mengembangkan seluruh staf disekolah. Kemudian Hendiyat dalam Binti Maunah (2017:27), menyatakan tujuan kongkrit supervisi pendidikan ialah membantu guru dalam hal-hal sebagai berikut a) melihat dengan jelas tujuan-tujuan

pendidikan, b) membimbing pengalaman belajar murid, c) menggunakan alat pembelajaran modern, metode-metode dan sumber-sumber pengalaman belajar, d) menilai kemajuan murid-murid dan hasil pekerjaan guru itu sendiri, e) membantu mengarahkan guru-guru baru disekolah sehingga mereka merasa gembira dengan tugas yang diperolehnya, dan f) agar waktu dan tenaga guru tercurah sepenuhnya dalam pembinaan sekolah.

Sahertian (2008:21) fungsi supervisi pendidikan ialah untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Dalam beberapa literatur buku penulisan tentang fungsi supervisi yang diuraikan mengambil uraian fungsi supervisi yang diungkapkan Swearingen yaitu 1) mengkoordinasi semua usaha sekolah, 2) memperlengkapi kepemimpinan sekolah, 3) memperluas pengalaman guru-guru, 4) menstimulasi usaha-usaha yang kreatif, 5) memberi fasilitas dan penilaian yang terus menerus, 6) menganalisis situasi belajar-mengajar, 7) memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf, dan 8) memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru.

Berbeda dengan yang diuraikan Suharsimi Arikunto (2006:13) fungsi supervisi pendidikan ialah 1) sebagai kegiatan meningkatkan mutu pembelajaran, 2) sebagai pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur-unsur yang terkait dengan pembelajaran, dan 3) sebagai kegiatan memimpin dan membimbing para guru atau pendidik. Selanjutnya Made Pidarta (1999:23) menghimpun fungsi supervisi kepada beberapa bagian sebagai berikut: (a). Fungsi Utama:

Membantu pihak sekolah dan sekaligus mewakili pemerintah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan, yaitu membantu perkembangan individu para siswa. (b). Fungsi tambahan : membantu sekolah dalam membina para guru, agar dapat bekerja dengan baik dan dalam mengadakan kontak dengan masyarakat dalam rangka menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat serta memelopori kemajuan masyarakat.

Ruang Lingkup Supervisi Pendidikan

Ruang lingkup Supervisi adalah wilayah, daerah atau tepat cangkupan yang menjadi objek untuk disupervisi. Ruang lingkup supervisi di lembaga pendidikan meliputi berbagai aspek kehidupan yang berhubungan dengan penyelenggaraan proses belajar mengajar, sebagai implementasi kurikulum yang berlaku. Hal ini yang dimaksud lembaga pendidikan ialah lembaga pendidikan Islam dan lembaga pendidikan umum. Menurut Sarwoto (1985:103), secara teoritis yang menjadi objek supervisi ada dua aspek, yaitu aspek manusia dan aspek kegiatannya.

Dalam tulisan ini akan menguraikan ruang lingkup aspek-aspek supervisi pendidikan di lembaga pendidikan memiliki berbagai garapan/ruang lingkup berbagai macam realita dan problematika yang sedang dialami dan dihadapi lembaga pendidikan/ sekolah yang meliputi;

Aspek Manusia

Yang terlibat dalam aspek manusia yaitu seluruh yang menjadi stakeholder dalam lembaga pendidikan seperti pengawas, kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha dan siswa sendiri. Namun dalam hal

ini akan dibahas aspek manusia yang sangat berpengaruh dalam supervisi saja yaitu pengawas, kepala sekolah, dan guru. Menurut sarwoto (1985:104), aspek manusia membahas sikap terhadap tugas, disiplin kerja, moral kerja, kejujuran, ketaatan terhadap peraturan organisasi, kerajinan, kecakapan, kemampuan serta kecerdasannya.

1. Pengawas Sekolah

Pengawas sekolah adalah PNS yang diberi tugas wewenang dan tanggungjawab serta hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan dasar dan menengah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 55 ayat 1 yang berbunyi “Pengawasan satuan Pendidikan memiliki peran dan tugas untuk Pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan yang harus dilakukan secara teratur dan kesinambungan”. Kemudian Lebih lanjut pada Pasal 57 menegaskan, bahwa tugas supervisi meliputi: Supervisi akademik dan manajerial terhadap keterlaksanaan dan ketercapaian tujuan pendidikan di sekolah.

Sebagaimana telah diatur dalam PERMENPAN pasal 6 ayat 1 yaitu “Beban kerja Pengawas Sekolah adalah 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam perminggu di dalamnya termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian dan pembimbingan di sekolah binaan.” Namun realita yang terjadi di lapangan khususnya pada daerah-daerah terpencil kurang maksimalnya pembinaan yang dilakukan oleh pengawas. Seperti sangat jarang pengawas datang

untuk sekolah yang berada didaerah-daerah pedesaan karena jarak atau perjalanan yang membutuhkan waktu yang tidak sedikit, kemudian supervisi yang dilakukan oleh pengawas banyak yang bersifat majerial dan administrasi seperti pengawasan pada pelaporan baik kepala sekolah atau pun guru ataupun sarana dan prasarana namun untuk pensupervisian pada kegiatan belajar mengajar sangat kurang dilakukan seperti memberi pembinaan bagaimana metode atau teknik pembelajaran yang baik dan bagaimana cara guru dalam mengajar agar menyenangkan bagi peserta didik. Hal inilah yang menyebabkan supervisi kurang dirasa manfaatnya untuk peningkatan pembelajaran dikelas yang dilakukan guru. Harapannya ialah supervisi pengawasan yang dilakukan baik pada lembaga- lembaga pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh mensupervisi baik secara makro ataupun mikro dan untuk lembaga pendidikan baik sekolah ataupun madrasah yang terletak didaerah yang sulit dijangkau adanya perhatian khusus dari pemerintah untuk membuat peraturan atau kebijakan untuk melancarkan supervisi didaerah-daerah tersebut.

Mengingat pentingnya pengawas dan realita keberadaanya yang jauh dari memadai dari segi kuantitas maupun kualitas yang diharapkan, sedang disatu pihak berhadapan dengan sulitnya rekrutmen pengawas baru yang dipersyaratkan memiliki sertifikat atau Diklat Pengawas, sedang untuk pelaksanaannya harus melalui DIPA Kemenag. Kanwil/Pusat sehingga sulitdilakukan, maka berakibat akan menjadi hambatan utama di lapangan sehingga pelaksanaan pengawasan atau supervisi pendidikan disekolah tidak

maksimal. Hal tersebut menjadi problem yang dihadapi dalam pelaksanaan supervisi pada lembaga pendidikan islam yang menyebabkan adanya hambatan yang terjadi di lapangan banyak guru madrasah yang membutuhkan pembinaan dalam bidang mata pelajaran umum setara dengan sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan. Sementara pengawas madrasah yang ada berlatar belakang pendidikan agama Islam dan kurang memiliki kompetensi untuk memberikan arahan kepada guru-guru madrasah di bidang mata pelajaran umum tersebut. Dalam hal ini diharapkan kepada pengawas Kementarian Agama telah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap guru-guru pendidikan agama di lingkungan Dinas Pendidikan, maka seharusnya juga ada regulasi tentang pembinaan terhadap guru-guru mata pelajaran umum pada madrasah oleh pengawas di lingkungan Kemendiknas agar mutu pendidikan di madrasah tidak tertinggal, sehingga tidak terjadi lagi kasus-kasus nilai Ujian Nasional (UN) siswa madrasah secara umum terus berada di bawah siswa sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan.

2. Kepala Sekolah

Menurut Munir (2008:32), kepemimpinan kepala sekolah adalah cara atau usaha kepala sekolah dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua siswa dan pihak terkait untuk bekerja atau berperan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Secara lebih gamblang disebutkan dalam Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah yang salah satunya memiliki fungsi supervisi yang kompetensinya adalah sebagai

berikut: 1) Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru, 2) Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat, 3) Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

Menurut Rivai (1981:43), karakteristik perencanaan supervisi sebagai berikut: (1) supervisi tidak ada rencana yang standar, (2) perencanaan supervisi memerlukan kreativitas, (3) komprehensif, (4) kooperatif, dan (5) fleksibel. Selanjutnya Sahertian & Mataheru, (1981:38) dalam perencanaan supervisi pengajaran memiliki faktor-faktor yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut: (a) Kejelasan tujuan pendidikan di sekolah, (b) Pengetahuan tentang mengajar yang efektif, (c) Pengetahuan tentang anak (peserta didik), (d) Pengetahuan tentang guru, (e) Pengetahuan tentang sumber-sumber potensi kegiatan supervisi, dan (f) Kemajuan memperhitungkan faktor waktu. Realita di lapangan kepala sekolah sebagai supervisor sangat sedikit sekali dalam mensupervisi guru-gurunya dalam hal pembinaan dalam pembelajaran bahkan terkadang tidak semua guru disupervisi oleh kepala sekolah, padahal sebagai mana yang telah diuraikan Hendiyat dalam Binti Maunah (2017:27), menyatakan tujuan kongkrit supervisi pendidikan diatas salah satunya ialah membantu mengarahkan guru-guru baru di sekolah sehingga mereka merasa gembira dengan tugas yang diperolehnya. kepala sekolah terlalu banyak mengalihkan perhatian pada sarana dan prasarana yang ada di sekolahnya. Kecakapan dalam mensupervisi yang sangat lemah yang disebabkan

ketidakmampuan kepala sekolah dalam mensupervisi menjadi problem yang sangat besar karena supervisi kepala sekolah dapat berdampak pada kecakapan atau kemampuan pedagogik guru dalam pembelajaran. Supervisi kelas terhadap guru misalnya terlihat sebagai penilaian guru kinerja guru sebagai bahan untuk pelaporan penilaian kepala sekolah. Sehingga dalam pensupervisian tersebut tidak ada tidak lanjut dan pembinaan terhadap guru yang disupervisi yang seharusnya kepala sekolah lakukan, hal inilah yang menyebabkan kurangnya pembinaan dalam kompetensi pedagogik guru. Selaras dengan problem supervisi yang dikemukakan oleh Made Pirdata (1999:64) yaitu (a) secara legal yang ada dalam nomenklatur adalah jabatan pengawas bukan supervisor, (b) lingkup tugas jabatan pengawas lebih menekankan pada pengawasan administrasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru, (c) rasio jumlah pengawas dengan sekolah dan guru yang harus dibina/diawasi sangat tidak ideal, dan (d) persyaratan kompetensi, pola rekrutmen dan seleksi, serta evaluasi dan promosi terhadap jabatan pengawas juga belum mencerminkan perhatian yang besar terhadap pentingnya implementasi supervisi pada ruh pendidikan, yaitu interaksi belajar mengajar di kelas.

Harapannya ialah kepala sekolah bertindak sebagai supervisor benar-benar memiliki pengetahuan dan kecakapan dalam mensupervisi seluruh gurunya dan meminta bantuan kepada guru-guru senior untuk membantu mensupervisi untuk meratanya setia guru mendapat supervisi agar ada perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran disamping kepala sekolah bertindak sebagai

administratif disekolah tersebut. Supervisi hendaknya dilaksanakan melalui beberapa langkah, terus-menerus, dan berkesinambungan. Untuk memenuhi tugas tersebut, kepala sekolah tidak dibenarkan bekerja hanya untuk kejayaan sekolah pada masa kini saja, atau lebih ekstrim pada waktu ia memimpin sekolah itu. Sebagaimana yang dinyatakan Made Pirdata (1999:76) Kepala sekolah tidak boleh bekerja hanya untuk membuat nama dirinya baik dengan cara membina guru-guru agar rajin dan tepat waktu, agar roda perjalanan organisasi sekolah berjalan dengan lancar tanpa memikirkan masa depan guru.

3. Guru

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, dan panutan bagi peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu guru harus memiliki standar yang mencakup tanggung jawab dan kedisiplinan. Menurut Mulyasa (2009:37), Berkenaan dengan tanggung jawab, guru harus mengetahui, serta memahami nilai, norma moral, dan sosial, serta berusaha berperilaku dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Dan guru juga harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya dalam pembelajaran di sekolah, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun aspek yang harus dilihat oleh supervisor menurut Fachruddin (2012:35) dalam peningkatan dan pemberdayaan guru meliputi ruanglingkup sebagai berikut yaitu; (a) kelayakan profesi, (b) kinerja, etos kerja, etika kerja dan pembagian kerja, (c) kesejahteraan dan peningkatan karier, (d) prestasi dan tugas, (e) ekspetasi dan dedikasi, dan (f) promosi, mutasi dan peningkatan kualitas melalui pendidikan.

Tidak semua guru yang dididik di lembaga pendidikan terlatih dengan baik dan berkualitas. Potensi sumber daya guru itu perlu terus menerus bertumbuh dan berkembang agar dapat melakukan fungsinya secara profesional. Selain itu, pengaruh perubahan yang serba cepat mendorong guru-guru untuk terus menerus belajar menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah sebabnya alasan mengenai perlunya supervisi pendidikan itu bertolak dari keyakinan dasar bahwa guru adalah suatu profesi.

Namun, terkadang guru merasa memiliki otonomi untuk melakukan apa saja tanpa merasa perlu supervisi yang mereka anggap intervensi dari kepala sekolah, pengawas, dinas pendidikan atau yayasan sekolah. Sehingga hal ini menjadi problem bagi para supervisor untuk melakukan pengawasan karena kurang mendapat respon dari guru. kurangnya respon guru dapat dilihat hasil dari supervisi yang diberikan pengawas atau kepala sekolah berupa pembinaan untuk memperbaiki belajar mengajar seperti penguasaan metode, pembuatan perencanaan pembelajaran yang tidak mau diterapkan, sehingga pembinaan dan tindak lanjut yang ada kurang bermanfaat. Sebagaimana Binti Munah (2017:154) menguraikan problem dalam supervisi yaitu (a) Sistem pembinaan yang kurang memadai, (b) Sikap mental yang kurang menunjang, (c) Kurang terkoordinirnya kegiatan pembinaan berbagai pihak yang berwenang di lapangan, baik secara *vertikal* maupun *horizontal*, sehingga sering membingungkan guru, dan (d) Persepsi, respon, dan sikap guru terhadap supervisi.

Harapannya ialah adanya kesadaran guru dalam memperbaiki pandangan terhadap supervisi, supervisi bukanlah hanya sebagai pengawasan atau penilaian melainkan pembinaan dan jalinan kerjasama antara guru dan pihak kepala sekolah dan pengawas dalam memajukan mutu pendidikan di sekolah.

Aspek Aktivitasnya

Adapun aspek aktivitas/kegiatannya menurut Suwoto dalam Fachruddin (2012:104) ialah meliputi cara kerja (cara mengajar), metoda pendekatan terhadap siswa, efisiensi kerja, dan hasil kerja. Hal ini menjelaskan apa yang menjadi perbedaan objek pengawasan (*controlling*) dan supervisi (*supervision*). Dalam aspek ini Purwanto (2003:52) menguraikan 3 unsur oprasional yang harus diperhatikan dalam supervisi ialah; 1) teknik edukatif, 2)teknik administrasi dan 3) koordinasi dan kerjasama.

1. Teknik Edukatif

Teknik edukatif masalah-masalah yang dihadapi ialah masalah kurikulum, proses belajar mengajar, evaluasi/penilaian dan kegiatan ekstra kurikuler. Realita dalam kurikulum pendidikan Indonesia yang berubah-ubah memiliki dampak pada mutu pendidikan menurun dan perubahan kurikulum yang begitu cepat menimbulkan masalah-masalah baru seperti menurunnya prestasi siswa, hal ini dikarenakan siswa tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran pada kurikulum yang baru. Perubahan ini juga berdampak pada sekolah dimana visi dan misi suatu sekolah yang sedang ingin dicapai terganggu dengan perubahan kurikulum tersebut. Sehingga dalam

supervisi seorang supervisor harus mengubah berulang kali dalam pembinaan supervisi, problem yang selalu menjadi kebingungan para pendidik/guru dalam menerapkan pembinaan supervisi.

Dalam tahapan evaluasi/penilaian supervisi menurut Risnawati (2014:242) penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan murid, keberhasilan guru, serta factor-faktor penunjang dan penghambat dalam proses belajar mengajar. Penilaian tersebut dapat dilakukan dengan cara diskusi antar guru, pertemuan pribadi dan menentukan criteria bersama antar supervisor dengan guru. Pada waktu diskusi dengan guru, supervisor bertukar pikiran dengan guru-guru lainnya juga mengenai hal-hal yang mungkin masih perlu perbaikan dan pembinaan. Begitu pula dengan pertemuan pribadi. Pada pertemuan pribadi. Pada pertemuan tersebut guru melakukan percakapan dengan supervisor, terutama membicarakan kelemahan dan kekurangan yang dirasakan guru. Pada kesempatan itu guru dan supervisor bersama-sama memberikan penilaian terhadap kemampuan guru. Namun dalam tahapan ini seorang supervisor tidak mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan apa-apa yang harus diperbaiki ataupun memberi pembinaan dan solusi pada guru sehingga terkesan hanya sebagai pengawasan belaka.

Menurut Soetopo dan Wasty (1986:123) kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan sebagai kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai-nilai atau sikap, dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari siswa dalam mata pelajaran program inti dan pilihan. kegiatan ekstrakurikuler ini lebih menekankan pada kegiatan

kelompok. Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dengan memperhatikan minat dan bakat siswa, serta kondisi lingkungan dan social budaya. Pelaksanaannya ditangani oleh guru atau petugas lain yang ditunjuk. Contoh kegiatannya keolah-ragaan seperti bola basket, bola voli, dan pencak silat, dipilih sesuai dengan minat dan bakat siswa. Begitu pula dalam bidang penalaran seperti jurnalistik dan kelompok ilmiah remaja. Juga, dalam bidang seni seperti drama, lukis, dan tari. Keseluruhan bidang ini merupakan wahana untuk memperluas wawasan, serta membangun nilai dan sikap positif siswa. Menurut purwanto (1987:99) supervisi ekstrakurikuler bertujuan untuk melihat apakah kegiatan ekstrakurikuler mengganggu pada belajar siswa, kesehatan dan keamanan siswa. Kenyataan yang terjadi dalam supervisi belum menjadi perhatian atau objek yang disupervisi, dikarenakan problem yang terjadi ketidak pahaman atas kegiatan ekstrakurikuler ini oleh supervisor.

Realita-realita diatas menjadi sebuah keinginan untuk memajukan pendidikan melalui supervisi pada aspek ini dengan harapan –harapan agar pemerintah lebih konsisten dalam menerapkan kurikulum, menjalankan kurikulum sampai sempurna dilaksanakan jangan mengubahnya sebelum kurikulum tersebut diketahui kekurangannya atau ketidak efektifan kurikulum yang ada, sehingga tidak terjadi kebingungan dalam menerapkannya bagi stekholder pendidikan. Pada seorang supervisor hendaklah memberikan evaluasi bagi guru-guru dan mendiskusikannya sebagai pembinaan kearah perbaikan belajar mengajar dan perlunya perhatian bagi kegiatan ekstrakurikuler agar ada dampak positif bagi

peserta didik dengan adanya perbaikan dan pembinaan gurunya dengan mensupervisi kegiatan ini.

2. Teknik Administrasi

Menurut Tsauri dalam Risnawati (2014:12) Ada beberapa yang menjadi prinsip-prinsip administrasi yang menyinggung organisasikelembagaan pendidikan , diantara prinsip-prinsip tersebut adalah : (a) Memiliki tujuan yang jelas, (b)Tiap anggota dapat memahami dan menerima tujuan tersebut, (c) Adanya kesatuan arah sehingga dapat menimbulkan kesatuan tindakan dan pikiran, (d) Adanya kesatuan perintah (*Unity of command*); para bawahan hanya mempunyai seorang atasan langsung dari padanya menerima perintah atau bimbingan dan kepada siapa ia harus mempertanggung jawabkan hasil pekerjaannya, (e)Koordinasi tentang wewenang dan tanggung jawab, maksudnya ada keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawabmasing-masing anggota, dan (f)Adanya pembagian tugas atau pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, keahlian dan bakat masing-masing, sehingga dapat menimbulkan kerjasama yang harfmonis dan kooperatif.

Menurut Fachruddin (2012:53) Teknik administrasi dalam supervisi meliputi administrasi personalia, administrasi material dan administrasi kurikulum dan sebagainya. Administrasi personalia melihat administrasi kenaikan pangkat guru dan kepala sekolah, pembagian tugas guru dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Purwanto (1987:99) administrasi material meliputi pemilihan sarana dan prasarana.

Dalam teknik administrasi ini dalam pelaksanaan supervisi hamper sangat sempurna karena dilakukan sangat baik, hanya yang menjadi problem ialah dalam administrasi pesonalia dalam hal kenaikan pangkat guru, banyak guru menggunakan jasa orang lain dalam pembuatan administrasi kenaikan pangkatnya. Harapan dalam teknik ini ialah adanya pembinaan khusus atau pelatihan dalam penyusunan administrasi kenaikan pangkat guru karena berkaitan dengan penggunaan IT yang belum dikuasai oleh guru.

3. Koordinasi dan Kerjasama

Koordinasi dan kerjasama purwanto (2003: 53) menguraikan beberapa cangkupan yaitu (a) sekolah dengan keluarga dan masyarakat, (b) sekolah dengan sekolah-sekolah lainya, (c) sekolah dengan lembaga swadaya masyarakat, (d) sekolah dengan organisasi kepemudaan, dan (e) sekolah dengan intansi pemerintahan terkait.

Realita yang ada dalam koordinasi dan kerjasama ialah tentang pengambil kebijakan tentang pendidikan belum berpikir tentang pengembangan budaya mutu dalam pendidikan. Apabila dicermati, maka mutu pendidikan yang diminta oleh *customers* sebenarnya justru terletak pada kualitas interaksi belajar mengajar antara siswa dengan guru. Kemudian nilai budaya interaksi sosial yang kurang positif, dibawa dalam interaksi fungsional dan professional antara pengawas, kepala sekolah dan guru. Kurang peduli untuk memahami budaya local yang ada di sekitar lingkungan lembaga pendidikan, menjadikan pengawas atau kepala sekolah tidak mau “masuk terlalu jauh” pada wilayah guru dan peserta didik. Selanjutnya guru tidak terbuka dan membangun hubungan professional yang akrab dengan kepala

sekolah dan pengawas. Guru menganggap mereka sebagai “atasan” sebaliknya pengawas menganggap kepala sekolah dan guru sebagai “bawahan”. Inilah yang menjadikan tidak terciptanya *rapport* atau kedekatan hubungan yang menjadi syarat pelaksanaan supervisi. Hal tersebut sebagaimana uraian problem supervisi pada perkembangan sosial dikemukakan oleh Mulyasa (2004:37) sebagai berikut: (a) para pengambil kebijakan tentang pendidikan belum berpikir tentang pengembangan budaya mutu dalam pendidikan, (b) Nilai budaya interaksi sosial yang kurang positif, dibawa dalam interaksi fungsional dan professional antara pengawas, kepala sekolah dan guru, dan (c) Tidak berkembangnya budaya paternalistik.

Harapannya dalam aspek ini ialah adanya pembinaan dari pemerintah untuk menyadarkan kepedulian terhadap lingkungan dan budaya sekitar bagi pengawas, dan kepala sekolah sehingga ketika dalam mensupervisi pengawas atau kepala sekolah dapat memahami bagaimana bertindak dalam menindaklanjuti dan evaluasi supervisi tersebut, sehingga akan terjadi hubungan harmonis dan saling pengertian diantara supervisor dan yang dsupervisi sehingga terjalin kerjasama yang baik pada setiap sisi kehidupan yang berhubungan dengan dunia pendidikan untuk menciptakan mutu pendidikan yang baik.

Kesimpulan

Supervisi merupakan pembinaan para guru dilaksanakan para supervisor secara kontinyu, diharapkan dapat menimbulkan semangat dan gairah bekerja para guru dalam menjalankan tugasnya. Umumnya supervisi pendidikan ditujukan kepada penciptaan atau

pengembangan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Untuk itu, ada 2 hal yang perlu diperhatikan yaitu: pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan hal-hal yang menunjang kegiatan belajar-mengajar. Dalam hal ini supervisi memiliki Ruang lingkup yang merupakan wilayah, daerah atau tepat cangkupan yang menjadi objek untuk disupervisi. Ruang lingkup supervisi di lembaga pendidikan meliputi berbagai aspek kehidupan yang berhubungan dengan penyelenggaraan proses belajar mengajar, sebagai implementasi kurikulum yang berlaku. Dalam hal ini yang dimaksud lembaga pendidikan ialah lembaga pendidikan Islam dan lembaga pendidikan umum. Dua aspek tersebut ialah aspek manusia dan aspek kegiatannya.

Dalam aspek- aspek tersebut memiliki berbagai realita dan problem yang harus di atasi oleh para supervisor khususnya bagi pemerintah yang memiliki wewenang dalam mengatasinya untuk mewujudkan iklim supervisi yang baik dan efektif yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan nasional seutuhnya.

KEPUSTAKAAN

Arikunto, Suharsimi, 1988. *Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*. Jakarta: P2LPTK, Ditjen Dikti, Depdikbud.

_____, 2004. *Dasar-dasar Supervisi*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.

_____, 2006. *Sasar-dasar Supervisi*. Jakarta : Rineka Cipta.

Ary H Gunawan. 2011. *Administrasi Sekolah : Administrasi Pendidikan Mikro*. Jakarta : Rineka Cipta

Daryanto, 2011. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta

- Fachruddin.2012.*Supervisi Pendidikan*. Medan : IAIN Press. Cet.VII
- Jasmani, mustofa Syaiful,.2013.*Supervisi Pendidikan*. Jogjakarta:Arruz Media.
- Pidarta, Made.1992. *Pemikiran Tentang Supervisi Pendidikan*. Jakarta :Bumi Aksara
- _____, 1999. *Pemikiran Tentang Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyasa, E. 2004. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- _____,(2009), *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Munah. Binti .2017.*Supervisi Pendidikan Islam:Teori dan Praktik*. Yogyakarta:Kalimedia
- Munir, Abdullah.2008. *Menjadi Kepala Sekolah Efektif*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Piet A.Sahertian. 2000. *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*,. Jakarta: Rieneka Cipta
- _____,2008.*Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan: Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*.Jakarta : Rineka Cipta
- Ngalim Purwanto.1987. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Mutiara
- _____,2003. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya
- Risnawati.2014.*Administrasi Dan Supervisi Pendidikan*. Yogyakarta: Aswaja Press

- Rivai,. 1981. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: alfabeta
- Sahertian & Mataheru, F. 1981. *Prinsip-Prinsip dan Teknik-teknik Supervisi Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional
- Sarwoto.1985.*Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Suprihatiningrum, Jamil.2013.*Guru Profesional*, Jogjakarta: Ar-ruzz Media
- Sudjana, Nana.dkk. 2006.*Standar Pengawas Mutu*. Jakarta : Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Direktorat Tenaga Kependidikan Depatemen Pendidikan Nasional
- Shulhan, Muwahid.2004. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta : Bina Ilmu
- Soetopo, Hendiyat,& Soemanto, Wasty.1984. *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*.Jakarta:PT. Bina Aksara
- Soetjipto dan Rafli Kasasi, 2011. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Suryosubroto, 2010. *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sutarasih, Cicih, Nurdin, 2009. *Supervisi Pendidikan :Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI*. Bandung: Alfabeta.
- Thaib, Amin dan Robie, Ahmad. 2005. *Standar Supervisi Pendidikan Pada MTs*.Jakarta: Depag RI